























turut didalamnya Hasan Sab. Dan dikota Lhokseumawe banyak terdapat tentara Jepang serta turut hadir Guncho Lhokseumawe Teuku Abdul Latif.

Kemerdekaan Indonesia dan pengibaran bendera Merah Putih juga dirasakan di Aceh Timur Langsa pada tanggal 1 Oktober 1945 dilapangan depan station kereta api Langsa diadakan upacara penurunan Hinomaru, Bendera Jepang. Merah Putih sudah disiapkan terlebih dahulu dikantor penerangan. Setelah Hinomaru diturunkan, lalu Merah Putih yang dikawal penuh hormat itu pun dibawakan ke tiang pengibaran. Di Kual Simpang bermula pada tanggal 3 September Haji Burhan Jamil, salah seorang tokoh politik di Kuala Simpang pergi ke Medan. Beliau ingin memastikan kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau akhirnya mendapatkan berita yang pasti dan segera kembali ke Kual Simpang, pada tanggal 5 September 1945 bertempat dilapangan depan kantor Camat Kuala Simpang diadakan acara pengibaran Sang Saka Merah Putih yang dihadiri oleh seluruh rakyat.

Aceh Tenggara pun setelah beberapa kemudian juga melaksanakan upacara kemerdekaan. Pada tanggal 4 Oktober dilaksanakan Upacara bendera Sangsaka Merah Putih dan pembacaan teks proklamasi. Dan setelah itu dilangsungkan rapat umum dengan pembicara A. R. Hajatdi Khabar Ginting. Tokoh yang aktif dalam kegiatan itu antara lain Abdul Karim, Ginot dan Gindo Bangko. Di Aceh tengah (Takengon) Teuku Mahmud mendapatkan berita Proklamasi dari Medan. Pada tanggal 5

Oktober, bertempat dilapangan Takengon, diadakanlah upacara penaikan bendera sekaligus pembacaan teks Proklamasi. Acara ini dipimpin oleh Raja Abdul Wahab. Di Aceh Selatan Tapak Tuan. Suwarno pegawai telepon menyampaikan berita proklamasi kepada Muhammad Nazir, mantan perwira Gyu-gun dan pada tanggal 14 September semua penduduk berkumpul dilapangan pasar Tapak Tuan untuk mengikuti upacara Proklamasi. Acara ini dipimpin oleh Muhammad Nazir dan Muhammad Ali Akbar. Di Aceh Barat Meulaboh adalah wilayah Aceh Barat pada bulan September 1945, setelah mendapatkan berita Proklamasi Kemerdekaan rakyat berkumpul dilapangan Meulaboh untuk menaikkan bendera Sangsaka Merah Putih acara ini dipimpin oleh pemuda-pemuda terutama mantan anggota pasukan Gyu-gun.

## **2. Merebut Senjata Jepang**

Setelah kekuatan-kekuatan bersenjata baik yang tergabung dalam tentara Republik Indonesia ataupun yang terhimpun dalam barisan laskar-laskar rakyat terbentuk dan berhasil melengkapi susunan organisasinya, maka keperluan yang mendesak adalah mengupayakan perlengkapan utama bagi suatu kesatuan militer, yaitu persenjataan. Kesadaran mengenai arti pentingnya persenjataan, yang bagi militer ibarat kesatuan antara jasad dengan roh, telah timbul sejak awal. Untuk memenuhi keperluan tersebut, satu-satunya cara yang paling cepat dan efektif dalam merebut senjata dari tangan bala tentara Jepang. Adalah







seharusnya menjadi wewenang pemerintah pusat, seperti: Peraturan Pembentukan Dewan Perwakilan Sumatera (tanggal 12 April 1946, no. 8/M.G.S), Peraturan Gaji Pegawai Negeri di Sumatera (PGS 1946, tanggal 22 Juli 1946, no. 128 a), Peraturan tentang pengeluaran uang atau tanda pembayaran resmi di Sumatera (tanggal 8 April 1947, no.92/K.O).<sup>21</sup>

Sejak 13 Oktober 1945, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera dari Negara republik Indonesia no. 1/X, Teuku Nyak Arif selaku Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh telah banyak berperan dalam menggerakkan roda Pemerintah Republik Indonesia disana, diangkat menjadi Residen Aceh. Dalam menjalankan Pemerintah sehari-hari Residen Teuku Nyak Arif dibantu oleh wakil Residen T. Mohd. Ali Panglima Polem dan Badan Eksekutif Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Istimewa Aceh, Teuanku Mahmud (Wakil Ketua).

Dengan lahirnya API di Daerah Aceh maka dasar yang kuat untuk tumbuhnya tentara resmi Negara Republik Indonesia. Pada bulan September 1945, mantan anggota KNIL (Tentara Hindia Belanda) juga membentuk polisi di Kutaraja. Pada tanggal 4 Oktober 1945 organisasi IPI (Ikatan Pemuda Indonesia) juga ikut serta dalam mempertahankan daerah Aceh dari serangan Penjajah, kemudian pada tanggal 6 Oktober organisasi IPI digantikan menjadi BPI (Barisan Pemuda Indonesia).

---

<sup>21</sup> T. Ibrahim Alfian, Zakariya Ahmad, dkk *Revolusi Kemerdekaan Indonesia Di Aceh Tahun (1945-1949)* (Daerah Istimewa Aceh: Deartemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Pemuseuman Daerah Aceh, 1982), 42

